

EVALUASI ANGGARAN DAERAH BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

Hari Kusuma Satria Negara¹

***Abstract: Evaluation of the Performance-Based Regional Budget in Financial Management (A Case Study of the City Government of Yogyakarta).** This research to evaluate based on performance in financial management. This research study case in Yogyakarta Government in financial year 2009, 2010 and 2010. This reseacr evaluate the budget about economic, efficiency and effectiveness of financial management. Research methdology ini this reseacrh use The Federation des Expert Compotable Europens or FEE. Teh result showed that Government of Yogyakarta in financial management has been an economic, efficient and effective.*

Abstrak: Evaluasi Anggaran Daerah Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta). Penelitian ini untuk mengevaluasi berdasarkan kinerja dalam pengelolaan keuangan. Ini studi kasus penelitian di Yogyakarta Pemerintah pada tahun buku 2009, 2010 dan 2010. reseacr ini mengevaluasi anggaran about ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian methdology Penelitian ini menggunakan Federasi Ahli Compotable Europens atau FEE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan telah menjadi ekonomi, efisien dan efektif.

Kata Kunci: Ekonomi, efisien, efektif, FEE.

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat – pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus di imbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah (Bisma Dan Susanto, 2010).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcomes). Penganggaran berbasis kinerja dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Menurut Mahsun (2006) pemerintah melalui menteri dalam negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

¹ Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: harikusuma_sn@yahoo.co.id

Begitu pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2008 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah" yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* serta pembangunan yang berkeadilan dan merata dalam tata kelola pemerintah daerah. Dari undang-undang tersebut sistem anggaran yang dipakai adalah *performance budgeting system* (sistem anggaran kinerja) yang memperhatikan fungsi dari masing-masing unit kerja serta pengelompokan kegiatannya serta menekankan pada segi pengendalian anggaran serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan (aktivitas) yang mencakup pendapatan pembelanjaan serta pembiayaan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran Publik berisi rencana kegiatan yang di representasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter dan secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran / belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*). Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*)
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
- d. Merevisi standard biaya atas target anggaran untuk tahun berikutnya

Safar (2003), mendefinisikan kinerja instansi pemerintahan sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilita dalam rangka memiliki keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa *Performance budget* pada dasarnya adalah sistim penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya Mardiasmo (2002) menyatakan Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan Sumber Daya dan Dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dalam pengawasan atas kinerja. Pendekatan ini juga mengutamakan penentuan dan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen, yaitu :

- a. Ekonomi
Pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b. Efisiensi

Pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ditetapkannya Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat – pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus di imbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah (Bisma Dan Susanto, 2010).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcomes). Penganggaran berbasis kinerja dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Menurut Mahsun (2006) pemerintah melalui menteri dalam negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

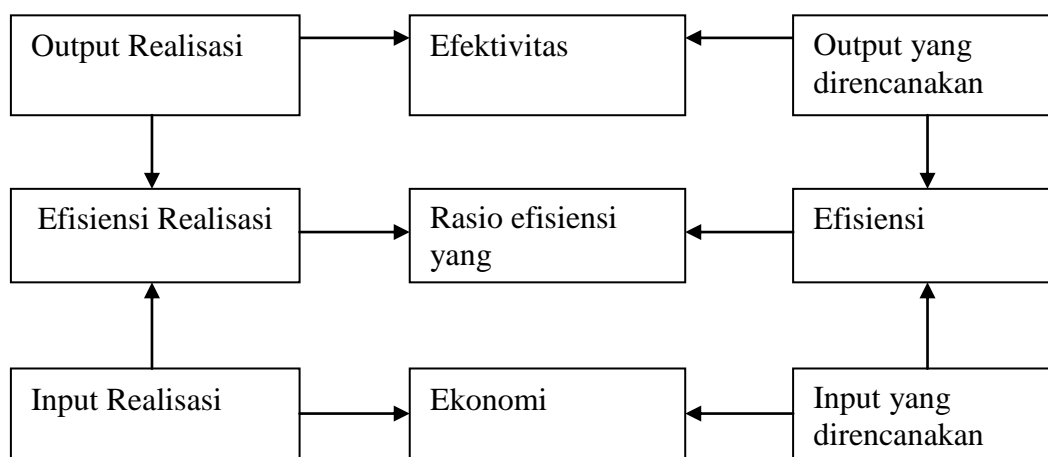
Begitu pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2008 tentang” Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* serta pembangunan yang berkeadilan dan merata dalam tata kelola pemerintah daerah. Dari undang-undang tersebut sistem anggaran yang dipakai adalah *performance budgeting system* (sistem anggaran kinerja) yang memperhatikan fungsi dari masing-masing unit kerja serta pengelompokan kegiatannya serta menekankan pada segi pengendalian anggaran serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan (aktivitas) yang mencakup pendapatan pembelanjaan serta pembiayaan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penentuan evaluasi anggaran daerah berbasis kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan metodologi deskriptif, yaitu membuat deskriptif sistematis faktual dan akurat tentang sifat-sifat objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu (Saifuddin, 2007). Penelitian deskriptif juga sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan alat analisis model FEE (*The Federation des Expert Comptable Europens*). Proses manifestasi dalam teknik perhitungan *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) yakni skor *value for money* dihitung berdasarkan ada tidaknya perbaikan kinerja aktual dibandingkan dengan rencananya. Sedangkan teknik yang dipakai untuk menyusun ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah pendekatan FEE. Model

FEE merupakan model pengukuran kinerja yang mendasarkan pada analisis varian sebagai tergambar melalui diagram berikut ini:



Gambar 1 Model FEE

a. Menghitung rasio ekonomi

Angka ini di peroleh dengan membandingkan *input* realisasian (realisasi anggaran belanja dengan input yang di rencanakan (anggaran belanja). Sehingga rasionya makin baik tingkat keekonomisan pada tingkat kualitas input tertentu dengan standard biaya yang wajar (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Input Realisasi}} \times 100\%$$

Membuat simpulan tentang berapa jauh pencapaian kinerja ekonomi aktivitas-aktivitas yang dilakukan unit kinerja, yakni dengan cara mentransformasikan ke dalam peningkatan sebagai berikut:

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Ekonomi

Rasio Ekonomi	Makna	Skor Ekonomi
>100%	Ekonomis	4
85% - 100%	Cukup Ekonomis	3
65%-84%	Kurang Ekonomis	2
<65%	Tidak Ekonomis	1

Sumber : Mahmudi (2010)

b. Menghitung Rasio Efisiensi

Langkah kedua dengan mengukur pencapaian efisiensi dengan pendekatan FEE (model FEE mengukur *value for money* berdasarkan analisis varian) yakni dengan

membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi yang di rencanakan. Efisiensi yang dihitung pada model ini adalah efisiensi dana (efisiensi teknis atau efisiensi alokatif) dan produktivitas karyawan. Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan *output* yang dihasilkan memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

Menghitung rasio efisiensi yang direncanakan. Rasio ini menghitung dengan membagi input yang direncanakan (anggaran belanja) dengan *output* yang direncanakan (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi Rencana} = \frac{\text{Input Rencana}}{\text{Output Rencana}}$$

Menghitung rasio efisiensi realisasi (*actual*). Rasio ini menghitung dengan mambagi input realisasian (realisasi belanja) dengan *output* realisasian (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi Realisasi} = \frac{\text{Input Realisasi}}{\text{Output Realisasi}}$$

Mencari rasio efisiensi. Angka ini diperoleh dengan mambandingkan rasio efisiensi yang direncanakan, sehingga makin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktifitas karena realisasi biaya per unit *output* lebih rendah dari perencanaan biaya per unit *output* lebih rendah dari rencana biaya per unit *output*, pada tingkat kualitas *output* tertentu (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Efisiensi Realisasi}}{\text{Efisiensi Rencana}} \times 100\%$$

Memberikan skor terhadap rasio peningkatan efisiensi (skor rasio efisiensi). Skor efisiensi ini diberikan sebagai dasar apakah realisasi aktivitas yang dilakukan oleh Pemda menunjukkan adanya perbaikan tingkat efisiensi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya (aspek pembelajaran atau pertumbuhan). Semakin kecil rasio, semakin efisiensi suatu kegiatan semakin besar skor rasio efisiensi pada tingkat kualitas *output* tertentu (tidak ada perbedaan signifikan antara kualitas *output* yang direncanakan dengan kualitas realisasinya).

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Efisien	
Rasio efisiensi	Skor
>100%	1
100%	2
90% - 99%	3
<90%	4

Sumber : (Mahmudi, 2010).

Dalam pencapaian kinerja efisiensi kemudian ditransformasikan ke dalam peningkatan sebagai berikut:

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja Efisien

Kinerja Efisiensi Teknik/Alokatif	Makna	Skor Efisiensi
>100	Sangat Efisiensi	5
85-99	Efisiensi	4
66-84	Cukup Efisiensi	3
50-64	Kurang Efisiensi	2
< 50	Tidak Efisiensi	1

Sumber : (Mahmudi, 2010).

c. Menghitung Rasio Efektivitas

Langkah ketiga yaitu dengan mengalihkan pencapaian kinerja efektivitas dengan pendekatan FEE yaitu membandingkan antara *output* realisasian dengan *output* yang direncanakan.

Indikator efektivitas per kegiatan dihitung dengan teknik sebagai berikut:

Menghitung rasio efektivitas dengan formula *output* realisasian bagi *output* yang direncanakan (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Output Realisasi}}{\text{Output Rencana}} \times 100\%$$

Memberikan skor terhadap rasio efektivitas (skor rasio efektivitas).

Skor efektivitas diberikan atas dasar apakah aktivitas yang dilakukan oleh Pemda menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dari rencana yang telah dibuat sebelumnya (aspek pembelajaran/pertumbuhan), dengan asumsi tidak ada perbedaan signifikan antara kualitas *output* aktual dengan kualitas *output* yang direncanakan. Semakin besar rasio, semakin efektif suatu kegiatan, semakin besar skor rasio efektivitas.

Tabel 4.
Pencapaian Kinerja Efektivitas

Rasio Efektivitas	Skor
<65%	1
65%-84%	2
85%-99%	3
>100%	4

Sumber : (Mahmudi, 2010).

Dalam pencapaian kinerja efektivitas dapat ditransformasikan kedalam peringkatan sebagai berikut:

Tabel 5.
Pencapaian Kinerja Efektivitas

Kinerja Efektivitas	Makna	Skor Efektivitas
>100	Sangat efektif	5
85-99	Efektif	4
65-84	Cekup efektif	3
50-64	Kurang efektif	2
< 50	Tidak efektif	1

Sumber : (Mahmudi, 2010).

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang- undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan di capai. Untuk mendukung kebijakan ini, perlu di bangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*).

Berdasarkan Laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2009, 2010 dan 2011 maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 6
Rekap Pendapatan dan Belanja 2009,2010,2011

Keterangan	2009		2010		2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daera	145.446.398.106	161.473.838.209	175.872.008.293	179.423.640.057	203.838.217.886	228.870.559.645
Pendapatan Transfer	569.117.156.969	574.257.953.157	622.281.028.692	614.973.004.594	676.871.497.996	686.260.682.997
Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	14.257.225.000	14.257.225.000	19.899.280.000	21.099.280.000	37.272.382.849	36.550.190.000
Total Pendapatan	728.820.780.075	749.989.016.366	818.052.316.985	815.495.924.651	917.982.098.731	951.681.432.642
Belanja Operasi	753.429.913.544	695.351.653.000	838.451.286.203	784.516.524.448	919.003.398.259	871.414.704.666
Belanja Modal	94.586.338.685	86.735.745.635	75.721.924.549	54.040.432.205	67.784.718.381	59.151.111.077
Belanja tdk Terduga	12.958.513.622	1.764.294.123	2.880.959.428	1.309.524.008	4.000.000.000	1.452.691.600
Total Belanja	860.974.765.851	783.851.692.758	917.054.170.180	839.866.480.661	990.788.116.640	932.018.507.343

Tabel 6 menunjukkan Pendapatan dan Belanja serta anggaran dan realisasi untuk tahun 2009, 2010 dan 2011. Dimana setiap tahun menunjukkan peningkatan nilai mulai dari 2009, 2010 hingga 2011. Pada penelitian berikut ini akan dinilai apakah selama 3 tahun terakhir ini pemerintah Kota Yogyakarta telah ekonomis, efisien dan efektif didalam melaksanakan roda pemerintahan.

a. Menghitung Indikator Ekonomi TA 2009, 2010, dan 2011

Indikator pertama yang dijadikan pengukuran adalah faktor ekonomi. Dimana faktor ekonomi ini akan menjadi acuan utama apakah yang dilakukan Pemerintah Kota telah termasuk ekonomis didalam mengelola pemerintahan

Tabel 7
Perhitungan Nilai ekonomi

Pencapaian Nilai Ekonomi	Input Rencana	Input Realisasi	Rasio	Skor Ekonomi
2009	860,974,765,851	783,851,692,758	110%	4
2010	917,054,170,180	839,866,480,661	109%	4
2011	990,788,116,640	932,018,507,343	106%	4
Rata-rata	922,939,017,557	851,912,226,921	108%	4

Pada tabel 7 dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011 memiliki nilai ekonomi dengan rasio 108%. Setelah dilakukan pengitungan skor maka nilai rata-rata skor akan di nilai dengan tabel penilaian keekonomian

Tabel 8
Skor Indikator Ekonomi

Hasil Skor Indikator Ekonomi TA 2009-TA 2011	Rasio Ekonomi	Makna	Skor Ekonomi	Keterangan
√	>100%	Ekonomis	4	Ternyata hasil rata-rata indikator ekonomi adalah 108% dan menempati rasio ekonomi >100% yang memiliki skor 4 yang bermakna ekonomis
	85%-100%	Cukup Ekonomis	3	
	65%-84%	Kurang Ekonomis	3	
	<65%	Tidak Ekonomis	2	

Pada penelitian ini telah dilakukan evaluasi atas keekonomisan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah ekonomis. Berdasarkan Skor indikator ekonomi untuk nilai rata-rata Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2009, 2010 dan 2011. Berdasarkan perhitungan menunjukkan nilai 108% yang berarti memiliki makna bahwa rata-rata selama tiga tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta Ekonomis dalam pengelolaan pemerintahan. Hal senada juga disampaikan oleh Mardiasmo (2002) bahwa dengan adanya otonomi daerah akan meningkatkan keekonomian setiap daerah. Dalam Undang No 32 Tahun 2004, juga telah disampaikan dengan otonomi daerah akan meningkatkan perekonomian suatu daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan warga.

b. Menghitung Indikator Efisiensi Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2009-2011

Indikator kedua yang akan dilakukan perhitungan oleh peneliti adalah mengenai tingkat efisiensi sebuah Pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Penilaian efisiensi ini dilakukan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 dengan menilai input dan output baik untuk anggaran dan juga realisasi.

Penelitian ini telah melakukan perhitungan rasio efisiensi rencana dan efisiensi realisasi yang kemudian dilakukan perhitungan mengenai rasio efisiensi. Adapun hasil perhitungan rasio dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9
Perhitungan Nilai Efisiensi

Efisiensi	Rasio Efisiensi Rencana	Rasio Efisiensi Realisasi	Rasio Efisiensi
2009	118%	105%	88%
2010	112%	103%	92%
2011	108%	98%	91%
Rata-rata	113%	102%	90%

Perhitungan nilai rasio efisiensi Pemerintahan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 memiliki nilai rata-rata rasio 90%. Nilai rata-rata rasio efisiensi pada tabel indikator berikut ini.

Tabel 10
Indikator Efisiensi

Hasil Skor Indikator Efisiensi TA 2009-TA 2011	Rasio Efisiensi	Skor	Kinerja Efisiensi	Makna	Skor	Keterangan
√	>100%	1	>100	Sangat Efisien	5	Hasil rata-rata skor indikator efisiensi adalah 90%. Dimana hasil itu menunjukkan pada peringkat 4 dengan makna efisiensi
	100%	2	85-99	Efisien	4	
	90%-99%	3	65-64	Cukup Efisien	3	
	<90%	4	50-64	Kurang Efisien	2	
			<50	Tidak Efisien	1	

Pada tabel 10 diatas telah dilakukan pengklasifikasian atas nilai dimana indikator efisiensi Pemerintah Kota Tahun anggaran 2009,2010 dan 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta efisien dalam melakukan kegiatan. Hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa pada proses kegiatan operasional pada produk/hasil kerja yang telah dilakukan dapat di capai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*), serta dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang di gunakan untuk membiayai pembangunan dan aktifitas pemerintah daerah yang cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan sehingga pencapaian sasaran yang optimal. Sehingga pencapaian ini diharapkan dapat ditingkatkan lagi supaya menghasilkan kinerja yang sangat efisien.

c. Menghitung Indikator Efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2009-2011

Penilaian yang ketiga adalah penilaian efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011. Pengukuran yang efisiensi dilakukan dengan melakukan perbandingan atau menilai rasio antara output rencana dan output realisasi.

Tabel 11
Perhitungan Rasio Efektivitas

Efektivitas	Output Rencana	Output Realisasi	Rasio
2009	728,820,780,075	749,989,016,366	103%
2010	818,052,316,985	815,495,924,651	100%
2011	917,982,098,731	951,681,432,642	104%
Rata-rata	821,618,398,597	839,055,457,886	102%

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan nilai rata-rata sebesar 102%. Nilai rasio 102% akan kita nilai berdasarkan skor indikator efektivitas, berikut tabel indikator pada tabel 12 dibawah ini

Tabel 12
Indikator Nilai Efektivitas

Hasil Skor Indikator Efektivitas TA 2009-TA 2011	Kinerja Efektivitas	Makna	Skor	Keterangan
√	>100	Sangat Efektif	5	Hasil Skor menunjukkan nilai 102%, yang bermakna sangat efektif
	85-95	Efektif	4	
	65-84	Cukup Efektif	3	
	50-64	Kurang Efektif	2	
	<50	Tidak Efektiv	1	

Pada tabel 12 diatas menunjukkan bahwa skor rasio efektivitas Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 sebesar 102% termasuk dalam kategori sangat efektif. Nilai sangat efektif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan pemerintahan sangat efektif dalam pengelolaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian evaluasi anggaran daerah berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan (studi kasus pemerintah kota Yogyakarta) pada tahun 2009,2010 dan 2011. Penelitian ini melakukan pengujian nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Hasil pengujian yang kami lakukan menunjukkan pada nilai pada indikator ekonomis sebesar 108% yang bermakna bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan ekonomis. Nilai ekonomis ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mensejahterakan warganya. Hasil pengujian yang kedua dalam melakukan perhitungan atas nilai efisiensi. Indikator efisiensi menunjukan nilai 90%, yang berarti pemerintah Kota Yogyakarta efisien dalam pengelolaan pemerintahan. Namun dalam penelitian ini ataupun penelitian yang lainnya belum ada yang menilai seberapa efisien pemerintah Kota Yogyakarta dalam penggunaan sumber daya manusianya. Pengujian ketiga yang menguji mengenai nilai efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 menghasilkan skor rasio sebesar 102% yang berarti lebih dari 100% yang berarti sangat efektif. Pengelolaan anggaran pemerintah Kota Yogyakarta selama 3 tahun terakhir sangat efektif. Berdasarkan hasil ketiga pengujian menggunakan FEE ini dimana Pemerintah Kota Yogyakarta yang menunjukkan nilai ekonomis, efisien dan sangat efektif berarti Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pengelolaan keuangan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Bisma, I Dewa Gde; H. Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010.
- Cipta, H. (2011). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi dipublikasikan, Universitas Andalas, Sumatera Utara.
- Damayanti, Theresia Woro. (2004). *Pelaksana Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Salatiga)*. Salatiga: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulystiastuti. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial)*. Yogyakarta: Grava media.
- Safar, M. Nasir, Dkk.. (2003). *Prosinding Seminar Nasional. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Yogyakarta* Uad Press.
- Saifuddin, Azwar. (2007). *Metode Penelitian, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susanto, Heny. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 3003 sampai dengan TA 2007*. Mataram: Staf Pengajar Fakultas Ekonomi IKIP Mataram
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Bisma, I Dewa Gde; H. Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010.

- Cipta, H. (2011). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi dipublikasikan, Universitas Andalas, Sumatera Utara.
- Damayanti, Theresia Woro. (2004). *Pelaksana Self Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Salatiga)*. Salatiga: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahsun, Moh. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta*. Yogyakarta: Andi.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulystiastuti. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial)*. Yogyakarta: Grava media.
- Safar, M. Nasir, Dkk.. (2003). *Prosinding Seminar Nasional. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Yogyakarta* Uad Press.
- Saifuddin, Azwar. (2007). *Metode Penelitian, Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susanto, Heny. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 3003 sampai dengan TA 2007*. Mataram: Staf Pengajar Fakultas Ekonomi IKIP Mataram.
- .